

**PENGARUH STRUKTUR *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP
MANDATORY AND VOLUNTARY DISCLOSURES SETELAH KONVERGENSI
IFRS**

(Studi Empiris Pada Perusahaan LQ 45 tahun 2012-2013)

ARTIKEL ILMIAH



Oleh:

PRISCA AKVILA
2011310080

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
S U R A B A Y A
2015**

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Prisca Akvila
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 14 Mei 1993
NIM : 20113100080
Jurusan : Akuntansi
Program Pendidikan : Strata 1
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan
Judul : Pengaruh Struktur *Corporate Governance* terhadap
Mandatory and Voluntary Disclosures Setelah Konvergensi
IFRS (Studi Empiris Pada Perusahaan LQ 45 Tahun
2012-2013)

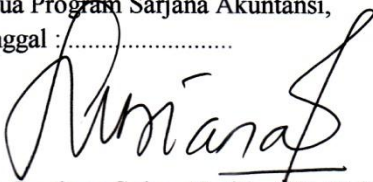
Disetujui dan diterima baik oleh:

Dosen Pembimbing,
Tanggal :



(Erida Herlina, SE.,M.Si)

Ketua Program Sarjana Akuntansi,
Tanggal :



(Dr. Luciana Spica Almilia, SE.,M.Si)

**PENGARUH STRUKTUR CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP
MANDATORY AND VOLUNTARY DISCLOSURES SETELAH
KONVERGENSI IFRS
(Studi Empiris Pada Perusahaan LQ 45 tahun 2012-2013)**

PRISCA AKVILA
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya
Email : priscalesmana@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine empirically the effect of corporate governance which is proxied by institutional ownership, managerial ownership, independent commissioner and audit committee for mandatory and voluntary disclosure. Mandatory disclosure in this study is based on the level of compliance of disclosure IFRS convergence. The sample used in this study based on criteria of sampling as many as 38 companies registered as a company LQ 45 in indonesia stock exchange for the period from 2014 to 2015 with the analysis of 2012-2013 so that the number of data samples 76. The data used in this study were obtained from IDX statistics.

According to anova F test in linear regression show that models of regression was fit so can be used to predict the dependent variable. While the result of the anova t test in linear regression show that audit committee was positive significantly on the mandatory disclosure, but institutional ownership, managerial ownership and independent commissioner wasn't significant effect on the mandatory disclosure. In addition, managerial ownership was positive significantly on the voluntary disclosure and independent commissioners negatively significantly on the voluntary disclosure, but institutional ownership and audit committee wasn't significant effect on the voluntary disclosure.

Keywords: *Institutional Ownership, Managerial Ownership, Independent Commissioner, Audit Committee, Mandatory Disclosure, Voluntary Disclosure, IFRS Convergence*

PENDAHULUAN

Era globalisasi menuntut perusahaan dapat menghasilkan laporan keuangan yang dapat dimengerti tidak hanya oleh pemangku kepentingan dari dalam negeri namun juga dari luar negeri. Hal ini membuat negara-negara dipenjuru dunia menerapkan sistem akuntansi internasional untuk perusahaan-perusahaan di negaranya. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan mampu diperbandingkan dan mudah untuk dianalisis oleh investor.

Setelah tanggal 1 Januari 2012 semua perusahaan go public dan

multinasional di Indonesia diwajibkan untuk menerapkan standar akuntansi yang konvergen dengan IFRS untuk penyusunan laporan keuangan Gamayuni (2009). Pemerintah Indonesia sebagai anggota dari The Group of Twenty (G20 Forum) telah bersepakat untuk melakukan konvergensi terhadap IFRS. Standar Akuntansi Internasional IFRS telah mengatur pengungkapan wajib pada laporan keuangan yang harus diungkapkan oleh perusahaan yang menjadikan IFRS sebagai pedoman dalam pelaporannya.

Pengungkapan wajib adalah pengungkapan minimum yang harus dilakukan perusahaan yang disyaratkan

oleh standar akuntansi yang berlaku Suwardjono (2005). Pengungkapan wajib ini memiliki tujuan agar investor dapat mengetahui informasi yang sebenarnya terkait dengan kinerja perusahaan.

Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang tidak diwajibkan oleh peraturan tertentu untuk perusahaan, namun perusahaan dengan sukarela mengungkapkan beberapa informasi untuk menarik perhatian investor.

Konflik keagenan yang terjadi akibat pemisahan peran dan perbedaan kepentingan antara pihak agen dan prinsipal dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan dalam laporan keuangan. Perusahaan yang ingin melakukan pengungkapan yang tinggi perlu menerapkan mekanisme *corporate governance* dalam sistem pengendalian dan pengelolaan perusahaan, sehingga konflik keagenan dapat diminimalisasi. Praktik *corporate governance* dapat berjalan dengan baik apabila menerapkan asas-asas yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan. Asas-asas yang diterapkan *corporate governance* diharapkan mampu meningkatkan tingkat pengungkapan baik wajib maupun sukarela pada perusahaan.

Ada empat mekanisme *corporate governance* yang seringkali dipakai dalam berbagai penelitian mengenai *corporate governance* yang bertujuan untuk mengurangi konflik keagenan, yaitu komite audit, komisaris independen, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial (Andri dan Hanung, 2007). Mekanisme *corporate governance* tersebut diharapkan dapat menjadi sistem pengendalian dan pengelolaan perusahaan. Oleh karena itu mekanisme *corporate governance* diprediksi dapat meningkatkan tingkat pengungkapan pada laporan keuangan.

Anggita (2014) melakukan penelitian dengan tujuan untuk menganalisis hubungan struktur *corporate governance* yang mempengaruhi tingkat

kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS pada laporan laba rugi komprehensif. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa *corporate governance* yang berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS pada laporan laba rugi komprehensif yaitu jumlah anggota komite audit dan jumlah rapat komite audit. Sedangkan untuk jumlah anggota dewan komisaris, proporsi komisaris independen tidak berpengaruh.

Penelitian Wardani (2012) yang menyatakan bahwa *corporate governance* yang mempengaruhi tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS adalah proporsi komisaris independen dan jumlah anggota komite audit. Hasil tersebut mendukung penelitian Anggita (2014) terkait pengaruh komite audit terhadap tingkat pengungkapan. Akan tetapi kedua penelitian tersebut berbeda hasil atas pengaruh dewan komisaris independen.

Hasil penelitian berbeda diungkapkan oleh Hossain dan Yao (2009) yang melakukan penelitian pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Malaysia. Hasil penelitian tersebut menemukan adanya hubungan positif antara ukuran Dewan dan dewan komisaris independen terhadap pengungkapan sukarela. Sedangkan rasio komite audit tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan sukarela pada perusahaan yang menjadi sampel penelitiannya.

Adanya hasil penelitian yang berbeda seperti diatas dan sedikitnya penelitian dengan topik diatas di Indonesia menginspirasi untuk melakukan penelitian dengan topik yang sama. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, peneliti ingin meneliti struktur pengaruh *corporate governance* terhadap tingkat pengungkapan baik wajib maupun sukarela. Tingkat pengungkapan wajib yang digunakan spesifik pada laporan laba rugi komprehensif.

Penelitian spesifik meneliti pada laba rugi komprehensif karena mengingat laba rugi adalah laporan yang selalu dilihat

oleh investor dan membuat pertimbangan investor dalam menanamkan modal. Setelah dikeluarkannya PSAK No. 1 (Revisi 2009) yang berlaku pada 1 Januari 2011, perusahaan *go public* yang berpedoman pada standar tersebut harus menyajikan laporan laba rugi nya dalam bentuk laba rugi komprehensif. Laporan laba rugi komprehensif adalah laporan laba rugi yang memasukan unsur laba komprehensif didalamnya. Laba komprehensif itu sendiri didefinisikan sebagai perubahan ekuitas yang berasal dari sumber-sumber non pemilik selama satu periode pelaporan.

Penelitian ini melakukan studi empiris pada perusahaan LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode Agustus 2014 sampai Februari 2015 dengan tahun analisis 2012-2013, hal ini karena perusahaan LQ 45 adalah perusahaan-perusahaan yang memiliki saham paling *liquid* di Bursa Efek Indonesia. Peneliti ingin mengetahui apakah perusahaan-perusahaan tersebut melakukan pengungkapan wajib secara penuh atau tidak.

Peneliti memilih tahun 2012-2013 untuk menjadi tahun pengamatan. Hal ini karena mulai tahun 2012 semua perusahaan *go public* dan multinasional di Indonesia diwajibkan untuk menerapkan standar akuntansi yang konvergen dengan IFRS. Pada tahun tersebut juga dilakukan evaluasi secara komprehensif terhadap pengimplementasian PSAK berbasis IFRS. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat pengungkapan wajib dan tingkat pengungkapan sukarela setelah konvergensi IFRS, serta variabel independennya adalah struktur *corporate governance* yang diproksikan dengan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen dan komite audit. Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti mengambil judul penelitian “Pengaruh Struktur *Corporate Governance* Terhadap *Mandatory And Voluntary Disclosures* Setelah Konvergensi IFRS (Studi Empiris

Pada Perusahaan LQ 45 Tahun 2012-2013)”.

Agency Theory

Hubungan agensi terjadi ketika pemilik perusahaan memperkerjakan atau mengontrak agen (*agent*) yaitu manajer untuk memberikan jasanya dan mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepadanya (Jensen dan Meckling 1976 dalam Ndaruningpuri 2006). Delegasi wewenang tersebut menyebabkan adanya kepentingan yang berbeda antara kedua pihak. Perbedaan kepentingan tersebut menimbulkan potensi konflik kepentingan yang disebut *agency problem*.

Agency problem seringkali terjadi pada perusahaan berkaitan dengan kepemilikan antara manajemen dan pemegang saham. *Agency problem* tersebut dapat diminimalisir dengan dua kategori, yaitu melalui insentif dan *monitoring* (Zhou dan Panbunyuen, 2008 dalam Wulan, 2012). Insentif dan *monitoring* dapat berjalan dengan baik jika perusahaan menerapkan mekanisme *corporate governance*.

Agency theory menjelaskan pentingnya praktik pengungkapan pada laporan keuangan baik wajib maupun sukarela oleh manajemen kepada para pemegang saham maupun pihak lain yang berkepentingan (Ferry dan Diyanti, 2010). Praktik pengungkapan perlu dilakukan perusahaan melalui penyampaian laporan untuk menghindari asimetri informasi antara manajemen dengan *stakeholders* (Anggita, 2014). Pengungkapan informasi yang tinggi dapat meminimalisasi *agency problem* yang terjadi pada perusahaan.

Konvergensi IFRS

IFRS adalah standar akuntansi internasional yang dibuat oleh *International Accounting Standar Board (IASB)*. *International Financial Reporting Standards* (IFRS) adalah standar pelaporan akuntansi yang memberikan penekanan pada penilaian secara profesional dengan

disclosures yang jelas dan transparan. Standar ini muncul akibat tuntutan globalisasi yang mengharuskan para pelaku bisnis di suatu negara ikut serta dalam bisnis internasional, maka diperlukan suatu standar internasional yang berlaku sama di semua negara untuk memudahkan proses membaca informasi pada laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan di berbagai negara.

Konvergensi IFRS dideklarasikan pada tahun 2008. Deklarasi tersebut mengungkapkan bahwa pada mulai tanggal 1 Januari 2012 seluruh standar yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI akan berpedoman kepada IFRS dan harus diterapkan oleh seluruh entitas yang *go public*. Konvergensi IFRS di Indonesia dimulai secara bertahap sejak 2008 hingga 2011. Tahapan tersebut terdiri dari tahap adopsi pada tahun 2008 hingga tahun 2010, tahap persiapan akhir yang dilaksanakan selama tahun 2011 dan tahap pengimplementasian PSAK berbasis IFRS serta dilakukan evaluasi secara komprehensif mulai tahun 2012 (Husin, 2008 dalam Wardani, 2012). konvergensi IFRS sendiri didefinisikan sebagai sebuah proses untuk menyelaraskan standar akuntansi yang dipakai di suatu negara dengan IFRS (Chen, 2009). Konvergensi IFRS diharapkan akan memperkecil perbedaan di antara keduanya.

Disclosures

Suwardjono (2005 : 578) menyatakan secara konseptual pengungkapan adalah suatu bagian integral dari proses pelaporan keuangan, sedangkan secara teknis pengungkapan merupakan langkah terakhir dalam proses akuntansi yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh statemen keuangan dari pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran.

Mandatory Disclosure

Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan minimum pada laporan

keuangan yang disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku (Suwardjono, 2005 : 581). Adina dan Ion (2008) dalam Wardani (2012) mendefinisikan bahwa *mandatory disclosure* adalah informasi yang harus diungkapkan sebagai konsekuensi dari adanya ketentuan perundang-undangan, pasar saham, komisi bursa saham atau peraturan akuntansi dari pihak yang berwenang.

Voluntary Disclosure

Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang tidak diwajibkan oleh aturan yang berlaku sehingga informasi yang diungkapkan bersifat sukarela. Perusahaan dapat memilih sendiri item-item yang akan diungkapkan dalam laporan keuangannya. Pengungkapan sukarela merupakan pilihan bebas manajemen perusahaan untuk memberikan informasi akuntansi dan informasi lain yang relevan untuk pembuatan keputusan bagi para pemakai laporan tahunan. Tujuan pengungkapan informasi sukarela adalah untuk menarik perhatian investor dan membantunya memahami strategi bisnis manajemen, sehingga investor melanjutkan investasi (Healy dan Palepu, 1993 dalam Ria dan Rita, 2010).

Corporate Governance

(FCGI) Forum *Corporate Governance* Indonesia (2001) mendefinisikan corporate governance sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan para *stakeholder* perusahaan yaitu pemegang saham, pengurus (manajer) perusahaan, kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan yang lain baik internal maupun eksternal terkait dengan hak-hak dan kewajiban mereka. Menurut Muh. Arief (2009: 2) mendefinisikan *good corporate governance* sebagai seperangkat sistem dan kebijakan yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan dengan cara

mendorong terbentuknya manajemen yang bersih dan transparan.

Pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan wajib

Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen perusahaan melalui proses *monitoring* dan evaluasi secara efektif sehingga akan mempengaruhi tingkat pengungkapan yang lebih tinggi pada laporan keuangan (Gideon, 2005).

Berdasarkan uraian tersebut dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1: Ada pengaruh kepemilikan institusional terhadap tingkat pengungkapan wajib.

Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan wajib

Manajer yang memiliki saham perusahaan memiliki insentif dan motivasi yang lebih besar untuk memaksimalkan kinerjanya dalam perusahaan, seperti mematuhi pengungkapan yang disyaratkan (Al-Fayoumi et al. 2010 dalam Wulan, 2012).

Berdasarkan uraian tersebut dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2: Ada pengaruh kepemilikan manajerial terhadap tingkat pengungkapan wajib.

Pengaruh komisaris independen terhadap pengungkapan wajib

Semakin besar proporsi komisaris independen dalam sebuah perusahaan, maka proses pengawasan yang dilakukan dewan komisaris semakin berkualitas dan efektif. Komisaris independen akan menuntut adanya transparansi melalui pengungkapan informasi dalam pelaporan keuangan yang dikeluarkan perusahaan (Marihot dan Doddy, 2007).

Berdasarkan uraian tersebut dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3: Ada pengaruh komisaris independen terhadap tingkat pengungkapan wajib.

Pengaruh komite audit terhadap pengungkapan wajib

Komite audit adalah komite yang dibentuk untuk membentuk dewan komisaris menjalankan tugas dan fungsinya pada suatu perusahaan (FCGI, 2001). Semakin besar proporsi komite audit diperusahaan diharapkan mendorong pihak manajemen melakukan transparansi informasi.

Berdasarkan uraian tersebut dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H4: Ada pengaruh komite audit terhadap tingkat pengungkapan wajib.

Pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan sukarela

Semakin besar kepemilikan saham institusional atas perusahaan diharapkan dapat memberikan kendali bagi perusahaan sehingga pihak manajemen dapat memberikan informasi bagi stakeholder secara transparan. Berdasarkan uraian tersebut dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H5: Ada pengaruh kepemilikan institusional terhadap tingkat pengungkapan sukarela.

Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan sukarela

Kepemilikan saham perusahaan oleh manajemen diharapkan membuat manajemen termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya dan melakukan pengungkapan secara sukarela untuk menarik perhatian calon investor perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H6: Ada pengaruh kepemilikan manajerial terhadap tingkat pengungkapan sukarela.

Pengaruh komisaris independen terhadap pengungkapan sukarela

Komisaris independen adalah komisaris yang tidak terafiliasi dengan perusahaan. Komisaris independen diharapkan dapat menuntut pihak manajemen perusahaan untuk melakukan

pengungkapan sukarela lebih tinggi agar tidak menyesatkan stakeholder perusahaan.

Berdasarkan uraian tersebut dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

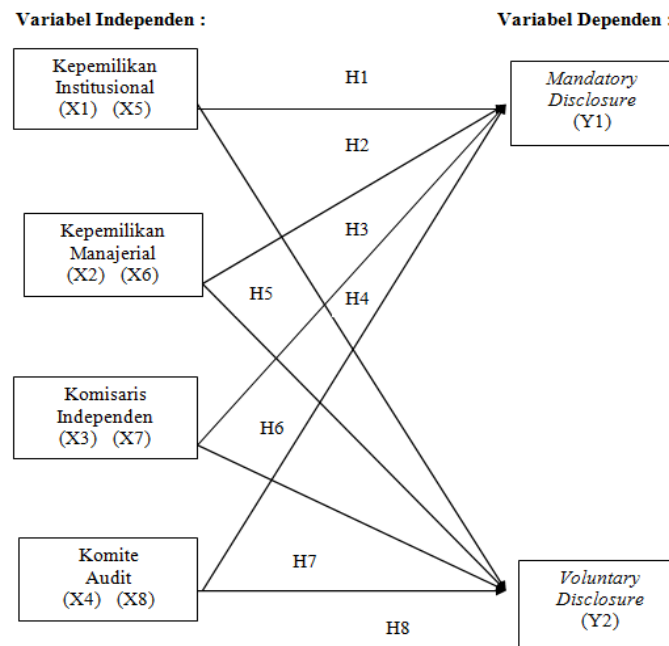
H7: Ada pengaruh komisaris independen terhadap tingkat pengungkapan sukarela.

Kehadiran komite audit independen dalam suatu perusahaan diharapkan dapat mendorong pihak manajemen perusahaan untuk memberikan informasi yang bersifat sukarela bagi stakeholder perusahaan.

Berdasarkan uraian tersebut dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H8: Ada pengaruh komite audit terhadap tingkat pengungkapan sukarela

Pengaruh komite audit terhadap pengungkapan wajib



Gambar 1
Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Klasifikasi Sampel

Obyek penelitian ini adalah perusahaan LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode Agustus 2014 hingga Februari 2015 dengan tahun pengamatan 2012-2013. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode *purposive sample*, sehingga dapat diperoleh sampel yang mewakili sesuai dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan. Kriteria-kriteria perusahaan yang menjadi sampel-sampel penelitian ini adalah sebagai berikut:

1 Perusahaan LQ 45 yang terdaftar di

- Bursa Efek Indonesia (BEI) periode Agustus 2014 hingga Februari 2015.
- Perusahaan menerbitkan laporan keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember tahun 2012-2013.
- Perusahaan memiliki data kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komposisi dewan komisaris dan komite audit.

Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode Agustus 2014

hingga Februari 2015 dengan tahun pengamatan 2012-2013. Data tersebut diperoleh dari Indonesia *Capital Market Directory* (ICMD), dan *website* IDX (*Indonesia Stock Exchange*).

Definisi Operasional Variabel

Tingkat Pengungkapan Wajib Konvergensi IFRS

Variabel dependen pertama adalah tingkat pengungkapan wajib setelah konvergensi IFRS pada laporan laba rugi komprehensif. Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan minimum pada

laporan keuangan yang disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku (Suwardjono 2005 : 581).

Identifikasi item pengungkapan wajib dilakukan dengan menggunakan Deloitte IFRS *Presenstation and Disclosure Checklist* yang diperoleh dari situs www.iasplus.com (Anggita, 2014). Item-item tersebut dipilih dari *checklist* yang berkaitan dengan laba rugi komprehensif pada laporan keuangan dan disesuaikan dengan PSAK yang berlaku dan diwajibkan di Indonesia pada tahun 2012-2013. Berikut ini adalah PSAK yang telah konvergen dengan IFRS yang digunakan dalam penelitian ini

No.	Nomor PSAK	Nomor IAS	Tanggal Efektif
1.	PSAK 14 (Rev. 2008) Persediaan	IAS 2 : <i>Inventories</i>	01-01-09
2.	PSAK 25 (Rev. 2009) Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan	IAS 8 : <i>Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors.</i>	01-01-11
3.	PSAK 46 (Rev. 2010) Pajak Pendapatan	IAS 12 : <i>Income Taxes</i>	01-01-12
4.	PSAK 16 (Rev. 2007) Aset Tetap	IAS 16 : <i>Property, Plant and Equipment</i>	01-01-08
5.	PSAK 23 (Rev. 2010) Pendapatan	IAS 18 : <i>Revenue</i>	01-01-11
6.	PSAK 10 (Rev. 2010) Pengaruh Perubahan Kurs Mata Uang Asing	IAS 21: <i>The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates</i>	01-01-11
No.	Nomor PSAK	Nomor IAS	Tanggal Efektif
7.	PSAK 7 (Rev. 2010) Pengungkapan Pihak- Pihak yang Berelasi	IAS 24 : <i>Related Party Disclosure</i>	01-01-11
8.	PSAK 56 (Rev. 2010) Laba per Saham	IAS 33 : <i>Earning Per Share</i>	01-01-12

Sumber: www.iaiglobal.or.id dan *Deloitte IFRS Presentation and Disclosure Checklist*, lampiran 18

Pengukuran variabel pengungkapan wajib konvergensi IFRS pada laporan laba rugi komprehensif menggunakan teknik scoring. Pengukuran ini berdasarkan penelitian Anggita dan Aditya (2012) jika item yang perlu diungkapkan dapat diterapkan (*applicable*) dalam perusahaan dan item tersebut diungkapkan oleh perusahaan diberi skor 1, jika item tersebut tidak diungkapkan diberi skor 0, dan jika item tersebut tidak dapat diterapkan dalam

perusahaan akan diberi tanda N/A (*Not Applicable*).

$$\text{MANDSCR BY} = \frac{\sum \text{SCR BY}}{\sum \text{MAX BY}} \times 100 \%$$

dimana:

MANDSCRBY: skor kepatuhan pengungkapan wajib perusahaan b pada tahun y

SCRBY : jumlah item pengungkapan wajib yang diungkapkan perusahaan b pada tahun y

MAX BY : nilai maksimum pengungkapan wajib yang mungkin dicapai perusahaan b pada tahun y

Tingkat Pengungkapan Sukarela

Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang tidak diwajibkan oleh standar maupun hukum yang berlaku. Manajemen perusahaan bebas untuk memberikan informasi akuntansi dan informasi lain yang relevan untuk pembuatan keputusan bagi para pemakai laporan tahunan.

Variabel ini diukur menggunakan indeks pengungkapan sukarela yang didasarkan daftar pengungkapan sukarela berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Erna Wati (2013). Pengungkapan sukarela diukur menggunakan teknik *scoring*, dimana jika item-item pada daftar tersebut yang telah diungkapkan oleh perusahaan maka diberi *score* 1 dan jika tidak diungkapkan oleh perusahaan diberi *score* 0.

$$VOLDSCRBY = \frac{\sum VSCRBY}{\sum VMAXBY} \times 100\%$$

dimana :

VOLDSCRBY : skor pengungkapan sukarela perusahaan b pada tahun y

VSCRBY : jumlah item pengungkapan sukarela yang diungkapkan perusahaan b pada tahun y

VMAXBY : nilai maksimum pengungkapan sukarela

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham pada perusahaan oleh institusi lain seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan *investment banking*. Kepemilikan institusional diperoleh dari persentase saham perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan lain, baik perusahaan dalam maupun luar negeri dan pemerintah terhadap total saham perusahaan (Barako, 2007 dalam Wulan, 2012).

$$INST = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki institusi}}{\text{Jumlah saham yang beredar}}$$

Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan yang diukur dengan presentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen (Huafang, 2007 dalam Wulan, 2012). Ada tidaknya kepemilikan manajerial dilihat dari catatan atas laporan keuangan, khususnya pengungkapan atas modal saham perusahaan dan pengungkapan atas hubungan istimewa.

$$KPMJ = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki Manajemen}}{\text{Jumlah saham yang beredar}}$$

Variabel Komisaris Independen

Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya terkait perusahaan (Muh. Arief dan Bambang, 2007). Komisaris independen dalam penelitian ini diukur menggunakan skala rasio melalui presentase anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan terhadap seluruh ukuran anggota dewan komisaris perusahaan Wulan (2012)

$$KI = \frac{\text{Jumlah anggota dewan komisaris dari luar}}{\text{Jumlah seluruh anggota dewan komisaris}}$$

Variabel Komite Audit

komite audit adalah komite yang dibentuk untuk membentuk dewan komisaris menjalankan tugas dan fungsinya pada suatu perusahaan (FCGI, 2001).

Pengukuran komite audit dilakukan dengan menghitung persentase dari anggota komite audit diluar komisaris independen terhadap total komite audit dalam perusahaan (Rudi, 2008).

$$KMA = \frac{\text{Jumlah anggota dewan komite audit dari luar}}{\text{Jumlah seluruh anggota komite audit}}$$

Alat Analisis

Teknik analisis data adalah kegiatan mengolah data yang dikumpulkan untuk kepentingan pembahasan analisis. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan analisis regresi berganda yang diuji dengan menggunakan *software* SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) versi 16.0, yang berfungsi untuk menganalisis data dan melakukan perhitungan statistik baik *parametric* maupun *non parametric* dengan basis *windows* (Gozali, 2006:15).

Langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Mengumpulkan data (laporan keuangan) perusahaan LQ45 periode Agustus 2014 hingga Februari 2015 yang terdaftar di BEI tahun 2012-2013 yang sesuai dengan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan.
2. Tabulasi data yang terkait dengan pengungkapan, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen dan komite audit..
3. Menyusun model penelitian

$$MANDSCR = \beta_0 + \beta_1 INST + \beta_2 KPMJ + \beta_3 KI + \beta_4 KMA + e$$

$$VOLDSCR = \beta_0 + \beta_1 INST + \beta_2 KPMJ + \beta_3 KI + \beta_4 KMA + e$$

dimana :

MANDSCR= Tingkat Pengungkapan wajib

VOLDSCR= Tingkat Pengungkapan Sukarela

INST = Kepemilikan Institusional

KPMJ = Kepemilikan Manajerial

KI = Komisaris Independen

KMA = Komite Audit

e = Error term

4. Menguji Hipotesis Penelitian
5. Menentukan kriteria penolakan hipotesis, dengan probabilitas signifikansi $H_0 < 0,05$.
6. Melakukan Uji Asumsi Klasik
 - a. Uji Normalitas
 - b. Uji Multikoloniaritas
 - c. Uji Autokorelasi
 - d. Uji Heteroskedastisitas
7. Melakukan Uji Statistik F
8. Melakukan Koefisien Determinan (R^2)
9. Melakukan Uji Statistik t

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil pengujian secara statistik telah dirangkum oleh peneliti dan ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 1
Rangkuman Uji Regresi

No	Uji Regresi	Variabel Independen	Variabel Dependen	Nilai		Keterangan
				t hitung/ F hitung	Sig	
1	Uji Anova F tes	Kepemilikan institusional	Pengungkapan Wajib	2,726	0,036	Signifikan (Model Baik)
		Kepemilikan Manajerial				
		Komisaris Independen				
		Komite audit				
2	Uji Anova F tes	Kepemilikan institusional	Pengungkapan Sukarela	4,823	0,002	Signifikan (Model Baik)
		Kepemilikan Manajerial				
		Komisaris Independen				
		Komite audit				
3	Uji Anova t tes	Kepemilikan institusional	Pengungkapan Wajib	-0,861	0,392	Tidak Signifikan
		Kepemilikan Manajerial		0,798	0,427	Tidak Signifikan
		Komisaris Independen		-0,514	0,609	Tidak Signifikan
		Komite audit		2,874	0,005	Signifikan
4	Uji Anova t tes	Kepemilikan institusional	Pengungkapan Sukarela	-1,637	0,106	Tidak Signifikan
		Kepemilikan Manajerial		2,909	0,005	Signifikan
		Komisaris Independen		-3,141	0,002	Signifikan
		Komite audit		-1,511	0,135	Tidak Signifikan

Tabel diatas merupakan rangkuman dari pengujian pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen dan komite audit

terhadap pengungkapan wajib dan sukarela. Pengujian pengaruh tersebut didasarkan pada Uji Anova t tes dan pengujian kelayakan model didasarkan pada Uji Anova F tes.

Berdasarkan rangkuman diatas menunjukkan bahwa hasil pada saat diuji anova F tes menunjukkan bahwa model regresi dinyatakan fit atau baik sehingga dapat digunakan untuk memprediksi pengungkapan wajib dan sukarela. Untuk hasil pada saat dilakukan uji anova t tes menunjukkan bahwa yang berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan wajib adalah komite audit, sedangkan kepemilikan institusional, kepemilikan

manajerial dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan wajib. Hasil uji anova t tes yang kedua, menunjukkan bahwa terdapat dua variabel yang berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sukarela yaitu kepemilikan manajerial dan komisaris independen, sedangkan variabel lain yaitu kepemilikan institusional dan komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela.

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan wajib

Hasil analisis regresi dari Uji t yaitu secara masing-masing variabel menunjukkan bahwa variabel independen kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan wajib. Hal ini dapat dilihat berdasarkan nilai t hitung - 0,861 dengan nilai signifikan 0,392 lebih besar dari 0,05 ($>0,05$).

Penyebab kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan wajib, antara lain karena institusi yang menjadi investor cukup memiliki kedekatan dengan perusahaan sehingga dapat memperoleh informasi tentang perusahaan secara langsung dari manajemen, karena kepemilikan sahamnya yang mayoritas dalam perusahaan. Hal ini terbukti dari nilai rata-rata kepemilikan institusional pada sampel sebesar 61,16%, kepemilikan institusi yang besar lebih dari 50% membuat investor institusi dapat memperoleh informasi tentang perusahaan secara langsung dari manajemen.

Hasil penelitian ini tidak sependapat dengan penelitian Wulan (2012) yang menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan wajib. Perbedaan hasil dengan penelitian terdahulu dapat terjadi karena perbedaan sampel penelitian dan tahun pengamatan.

Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Pengungkapan Wajib

Hasil analisis regresi dari Uji t yaitu secara masing-masing variabel menunjukkan bahwa variabel independen kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan wajib. Hal ini dapat dilihat berdasarkan nilai t hitung 0,798 dengan nilai signifikan 0,427 lebih besar dari 0,05 ($>0,05$).

Hal-hal yang menyebabkan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan wajib, antara lain karena dari hasil uji deskriptif variabel kepemilikan manajerial menunjukkan bahwa nilai standar deviasi untuk tahun 2012 dan 2013 lebih besar dari nilai rata-rata kepemilikan manajerial tahun 2012 dan 2013. Hal ini berarti data dari variabel kepemilikan manajerial terlalu bervariasi atau tidak homogen, sehingga dapat menyebabkan variabel independen kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen pengungkapan wajib. Selain itu, secara statistik rata-rata jumlah kepemilikan saham manajerial pada perusahaan LQ 45 di Indonesia relatif kecil yaitu sebesar 0,21% pada tahun 2012 dan turun menjadi 0,17% pada tahun 2013, jumlah tersebut masih jauh dibawah 1%, sehingga belum terdapat keselarasan kepentingan antara pemilik dan manajer. Adanya kepemilikan manajerial yang relatif kecil menyebabkan manajer belum termotivasi untuk melakukan kepatuhan terhadap pengungkapan wajib. Hal demikian diungkapkan juga oleh (Muhammad Titan, 2012).

Hasil penelitian ini tidak sependapat dengan penelitian Wulan (2012) yang menyatakan kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap

pengungkapan wajib. Perbedaan hasil dengan penelitian terdahulu dapat terjadi karena perbedaan sampel penelitian dan tahun pengamatan

Pengaruh Komisaris Independen terhadap Pengungkapan Wajib

Hasil analisis regresi dari Uji t yaitu secara masing-masing variabel menunjukkan bahwa variabel independen komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan wajib. Hal ini dapat dilihat berdasarkan nilai t hitung - 0,514 dengan nilai signifikan 0,609 lebih besar dari 0,05 (>0,05).

Hal-hal yang menyebabkan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan wajib, antara lain karena adanya kemungkinan bahwa dewan komisaris independen memiliki kompetensi yang kurang

berkualitas. Nurika (2010) menyatakan bahwa kompetensi dewan komisaris memegang peranan penting dalam pengambilan keputusan, sehingga bukan hanya komposisi dewan komisaris independen yang dipertimbangkan, namun juga pengetahuan dan latar belakang pendidikan sehingga dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pada tingkat komisaris terkait dengan pengungkapan. Meskipun tidak diharuskan, tetapi akan lebih baik jika anggota dewan komisaris independen mempunyai kompetensi di bidang ekonomi sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya. Hal ini terbukti pada penelitian ini dimana hanya sedikit komisaris independen pada perusahaan yang memiliki latar belakang pendidikan ekonomi.

Tabel 2

PROPORSI PENDIDIKAN KOMISARIS INDEPENDEN

Total Komisaris Independen Berlatar Belakang Pendidikan Ekonomi	48
Total Komisaris Independen Pada Perusahaan Sample	100
Proporsi Komisaris Independen Berlatar Belakang Pendidikan Ekonomi	48%

Sumber : Diolah

Berdasarkan tabel diatas Menunjukkan bahwa dari 38 perusahaan LQ 45 yang menjadi sampel pada penelitian ini terdapat 100 orang yang menjabat sebagai komisaris independen untuk tahun 2012-2013. Dari 100 orang tersebut, hanya 48 orang yang memiliki latar belakang pendidikan ekonomi atau hanya 48% dari total komisaris independen. Hasil ini dapat menyebabkan komisaris independen kurang memiliki kompetensi terkait dengan pengungkapan wajib pada Standar Akuntansi karena tidak memiliki latar belakang pendidikan bidang ekonomi, sehingga hal ini dapat mempengaruhi hasil penelitian ini yang menunjukkan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pengungkapan wajib.

Selain itu, adanya budaya sungkan pada orang Indonesia untuk memberikan kritik kepada pihak lain menjadi salah satu alasan mendasar komisaris independen

memiliki arah negatif terhadap pengungkapan wajib. Amirudin (2004) menyatakan bahwa kehadiran komisaris independen hanya sekedar simbol atau hiasan belaka. Pengangkatan komisaris independen dilakukan hanya untuk pemenuhan regulasi semata tapi tidak ditujukan untuk terciptanya *corporate governance* yang baik dalam perusahaan.

Hasil penelitian ini sependapat dengan penelitian Anggita (2014) dan Wulan (2012) yang menyatakan bahwa proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan wajib. Namun hasil penelitian ini tidak sependapat dengan penelitian Wardani (2012) yang menyatakan proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan wajib.

Pengaruh Komite Audit terhadap Pengungkapan Wajib

Hasil analisis regresi dari Uji t yaitu secara masing-masing variabel

menunjukkan bahwa variabel independen komite audit berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan wajib. Hal ini dapat dilihat berdasarkan nilai t hitung 2,874 dengan nilai signifikan 0,005 lebih kecil dari 0,05 ($<0,05$), Sehingga dapat dinyatakan bahwa semakin besar proporsi komite audit independen pada perusahaan, maka semakin besar pula pengungkapan wajib yang dilakukan perusahaan.

Hal-hal yang menyebabkan komite audit berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan wajib, antara lain karena komite audit mampu menjalankan tugasnya secara profesional dalam melakukan audit pada perusahaan sehingga dapat mendorong manajemen untuk melakukan pengungkapan yang diwajibkan pada laporan keuangan. Selain itu, alasan mendasar atas pengaruh komite audit terhadap pengungkapan wajib adalah karena pada perusahaan LQ 45 jumlah komite audit telah memenuhi persyaratan yaitu dengan memiliki jumlah anggota komite audit minimal tiga orang dengan rata-rata komite audit independen lebih dari 30%, sehingga dengan jumlah yang proporsional demikian menunjang keefektifan kinerja komite audit terkait dengan melakukan audit atas kepatuhan pengungkapan wajib dalam laporan keuangan.

Hasil penelitian ini sependapat dengan penelitian Anggita (2014) dan Wardani (2012) yang menyatakan bahwa komite audit memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pengungkapan wajib setelah konvergensi IFRS. Namun hasil penelitian ini tidak sependapat dengan penelitian Wulan (2012) yang menyatakan komite audit tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pengungkapan wajib.

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan Sukarela

Hasil analisis regresi dari Uji t yaitu secara masing-masing variabel menunjukkan bahwa variabel independen kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sukarela. Hal ini dapat

dilihat berdasarkan nilai t hitung -1,637 dengan nilai signifikan 0,106 lebih besar dari 0,05 ($>0,05$).

Penyebab kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sukarela, antara lain karena nilai rata-rata kepemilikan institusional sebesar 61,16%, kepemilikan institusi yang besar lebih dari 50% membuat investor institusi dapat memperoleh informasi tentang perusahaan secara langsung dari manajemen karena kepemilikan mayoritasnya dalam perusahaan. Hal itu dapat membuat manajemen kurang termotivasi untuk mengungkapkan informasi sukarela dalam laporan tahunan perusahaan. Sehingga, semakin sedikitnya informasi strategis perusahaan yang diungkapkan oleh pihak manajemen perusahaan.

Hasil penelitian ini tidak sependapat dengan penelitian Li dan Qi (2008) yang menemukan pengaruh positif atas kepemilikan institusional terhadap pengungkapan sukarela.

Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Pengungkapan Sukarela

Hasil analisis regresi dari Uji t yaitu secara masing-masing variabel menunjukkan bahwa variabel independen kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sukarela. Hal ini dapat dilihat berdasarkan nilai t hitung 2,909 dengan nilai signifikan 0,005 lebih kecil dari 0,05 ($<0,05$), Sehingga dapat dinyatakan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan manajerial pada perusahaan, maka semakin besar pula pengungkapan sukarela yang dilakukan perusahaan.

Hal-hal yang dapat menyebabkan kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela antara lain, karena direksi atau komisaris selaku agen dan sekaligus pemilik perusahaan (pemegang saham) akan berupaya selalu terlihat bahwa mereka memiliki berbagai rencana strategis yang besar untuk

meningkatkan kinerja perusahaan. Hal ini dilakukan oleh manajerial agar mereka terlihat memiliki kepedulian yang lebih besar bagi perkembangan perusahaan dan juga kepada investor lain. Selain itu, adanya penghargaan bagi perusahaan yang mengeluarkan *annual report* yang didalamnya berisikan *corporate sosial responsibility and sustainability report* yang baik dan berkualitas membuat pihak manajemen perusahaan semakin termotivasi untuk membuat laporan tahunan yang baik. Perusahaan yang berhasil memperoleh penghargaan akan memiliki nilai tambah bagi calon investor, sehingga akan menguntungkan perusahaan dan juga pemegang saham (termasuk direksi dan komisaris yang memiliki saham perusahaan) dimasa yang akan datang.

Hasil penelitian ini sependapat dengan penelitian Li dan Qi (2008) yang menyatakan terdapat pengaruh positif kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan sukarela. Namun hasil penelitian ini tidak sependapat dengan penelitian Nancy (2012) yang menyatakan tidak ada pengaruh kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan sukarela.

Pengaruh Komisaris Independen terhadap Pengungkapan Sukarela

Hasil analisis regresi dari Uji t yaitu secara masing-masing variabel menunjukkan bahwa variabel independen komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sukarela. Hal ini dapat dilihat berdasarkan nilai t hitung -3,141 dengan nilai signifikan 0,002 lebih kecil dari 0,05 ($<0,05$), hasil nilai t hitung negatif, sehingga dapat dinyatakan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan manajerial pada perusahaan, maka semakin kecil pengungkapan sukarela yang dilakukan perusahaan.

Penyebab komisaris independen berpengaruh negatif terhadap pengungkapan sukarela yaitu karena adanya penyakit heteroskedastisitas pada variabel komisaris independen di

persamaan kedua (Y2) yang dapat dilihat pada tabel 4.19. Hal ini berarti penyebaran data dari waktu ke waktu terus berubah, sehingga akan mengalami kesulitan untuk mengestimasi model yang tepat akibat varian data yang tidak konsisten. Penyakit heteroskedastisitas ini akan berpengaruh terhadap penaksiran standar error yang bias. Penaksiran standar error yang bias akan menyebabkan hasil dari nilai t hitung juga menjadi bias. Hal tersebut menyebabkan pengambilan keputusan melalui pengujian hipotesis pengaruh komisaris independen terhadap pengungkapan sukarela menjadi bias juga.

Hasil penelitian ini tidak sependapat Akhtaruddin, Alam Hossain, Hossain, dan Yao (2009) yang menyatakan terdapat pengaruh positif komisaris independen terhadap pengungkapan sukarela.

Pengaruh Komite Audit terhadap Pengungkapan Sukarela

Hasil analisis regresi dari Uji t yaitu secara masing-masing variabel menunjukkan bahwa variabel independen komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sukarela. Hal ini dapat dilihat berdasarkan nilai t hitung -1,511 dengan nilai signifikan 0,135 lebih besar dari 0,05 ($>0,05$).

Hal-hal yang dapat menyebabkan komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela antara lain, karena komite audit hanya melakukan tugasnya terkait dengan hal-hal yang diwajibkan oleh peraturan maupun undang-undang dan kurang memperhatikan hal-hal yang bersifat sukarela demi peningkatan kinerja perusahaan. Hal ini terbukti dari hasil penelitian ini yang menyatakan komite audit memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib, namun tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan sukarela. Tindakan komite audit yang kurang menganggap pentingnya pengungkapan yang bersifat sukarela oleh perusahaan membuat manajemen perusahaan kurang termotivasi untuk

melakukan pengungkapan sukarela pada laporan tahunan.

Hasil penelitian ini sependapat Akhtaruddin, Alam Hossain, Hossain, dan Yao (2009) yang menyatakan tidak ada pengaruh komite audit terhadap pengungkapan sukarela.

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa :

1. Hasil uji untuk persamaan pertama yaitu Y1, menunjukkan bahwa dari hasil uji F yaitu secara simultan model regresi dalam keadaan yang baik atau *fit*. Hal ini dapat dilihat berdasarkan nilai F hitung 2,726 dengan nilai signifikan 0,036 lebih kecil dari 0,005 (<0,005). Sedangkan berdasarkan analisis regresi dari Uji t yaitu secara masing-masing variabel menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib. Hal ini dapat dilihat berdasarkan nilai signifikan masing-masing yaitu 0,392, 0,427, 0,609, dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,005 (>0,005). Sebaliknya variabel komite audit berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib. Hal ini dapat dilihat berdasarkan t hitung 2,874 dengan tingkat signifikan 0,005 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 (<0,05).
2. Hasil uji untuk persamaan kedua yaitu dengan variabel dependen pengungkapan sukarela, menunjukkan bahwa dari hasil uji F yaitu secara simultan model regresi dalam keadaan yang baik atau *fit*. Hal ini dapat dilihat berdasarkan nilai F hitung 4,823 dengan nilai signifikan 0,002 lebih

kecil dari 0,005 (<0,005). Sedangkan berdasarkan analisis regresi dari Uji t yaitu secara masing-masing variabel menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sukarela. Hal ini dapat dilihat berdasarkan nilai signifikan masing-masing yaitu 0,106 dan 0,135, dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,005 (>0,005). Sebaliknya variabel kepemilikan manajerial dan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib. Hal ini dapat dilihat berdasarkan nilai t hitung kepemilikan manajerial adalah 2,909 dengan tingkat signifikan 0,005 dan nilai t hitung komisaris independen adalah -3,141 dengan tingkat signifikan 0,002, dimana nilai signifikan kedua variabel tersebut lebih kecil dari 0,05 (<0,05). Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan positif dan komisaris independen berpengaruh signifikan negatif terhadap pengungkapan sukarela.

Secara deskriptif penelitian ini mengungkapkan bahwa rata-rata tingkat kepatuhan pengungkapan wajib yang dilakukan perusahaan belum mencapai 100% sebagaimana seharusnya. Namun tingkat pengungkapan sudah cukup tinggi yaitu 86,96% untuk tahun 2013 dan 87,96% untuk tahun 2012. Hal ini dapat terjadi karena mulai awal tahun 2012 perusahaan yang *go public* diwajibkan untuk menerapkan standar akuntansi yang konvergen dengan IFRS untuk penyusunan laporan keuangan. Selain itu sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan LQ 45, dimana perusahaan-perusahaan tersebut adalah perusahaan yang dipandang baik oleh investor karena memiliki saham *terliquid*. Sedangkan tingkat pengungkapan sukarela yang dilakukan perusahaan mencapai 55% untuk tahun 2013 dan 2012.

Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan pada penelitian ini, diantaranya adalah :

1. Pengungkapan wajib pada penelitian ini tidak didasarkan pada peraturan wajib yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun lembaga yang berwenang melainkan didasarkan pada *checklist* dari Deloitte .
2. Dalam penelitian ini terdapat 7 perusahaan yang dikeluarkan dari perusahaan karena tidak memiliki kelengkapan kriteria dan termasuk data outlier, sehingga hanya 38 perusahaan yang dijadikan sampel penelitian.
3. Nilai adjusted R Square yang rendah pada penelitian ini yaitu sebesar 8,4% dan 17%. Hal ini berarti bahwa masih ada faktor lain yang lebih besar yang berpengaruh terhadap pengungkapan wajib dan sukarela.
4. Pada uji normalitas untuk persamaan kedua yaitu dengan variabel dependen pengungkapan sukarela datanya harus di outlier meskipun hasilnya telah terdistribusi normal, hal ini karena mengikuti persamaan pertama yang hasilnya tidak terdistribusi normal.

Saran

Adapun saran pada penelitian ini, diantaranya adalah :

1. Penelitian selanjutnya sebaiknya menambah variabel *corporate governance* yang lain selain yang digunakan dalam penelitian ini seperti jumlah rapat dewan komisaris dan komite audit.
2. Penelitian selanjutnya sebaiknya menambah tahun pengamatan dengan tahun yang terbaru dan menggunakan sampel yang berbeda dengan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Akhtaruddin, M., M. A. Hossain, M. Hossain dan L. Yao. 2009. Corporate Governance and Voluntary

Disclosure in Corporate Annual Reports of Malaysian Listed Firms. *Journal of Accounting and Management Review* 7 (1): 1-20.

Anggita, P., & Aditya, S. 2014. Analisis Pengaruh Struktur Corporate Governance Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Konvergensi Ifrs Pada Laporan Laba Rugi Komprehensif. *Diponegoro Journal Of Accounting*, Volume 03, Nomor 02, Tahun 2014, Halaman 1.

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. 2006. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-134/BL/2006 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emiten atau Perusahaan Publik. http://bapepam.go.id/pasar_modal/regulasi_pm/peraturan_pm/index.htm

Boediono, G.S.B. 2005. Kualitas Laba: Studi Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Dampak Manajemen Laba Dengan Menggunakan Analisis Jalur. Simposium Nasional Akuntansi VIII Solo.

Chariri, Anis dan Imam Ghozali . 2007. Teori Akuntansi. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.

Chen, R. 2009. International Accounting Standards. Future Adoption of IFRS in Japan and The Japanese Accounting System. *Externredovisning Och Företagsanalys* No. 08-09- 130: 1-40.

Diyanti, Ferry. 2010. Mekanisme Good Corporate Governance , Karakteristik Perusahaan dan Mandatory Disclosure : Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI. Publikasi Ilmiah Program Magister Sains Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.

- FCGI. 2001. Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan). Jilid II, Edisi 2.
- Gamayuni, R. R. 2009. Perkembangan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia Menuju International Financial Reporting Standards. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 14 (2): 153-166.
- Ghozali, I. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariante dengan Program SPSS Cetakan IV*. Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.
- Indriani, E. W. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Luas Pengungkapan Sukarela dan Implikasinya terhadap Asimetri Informasi. *Accounting Analysis Journal* , 2(2).
- Indriantoro, & B. S. (2002). *Metodologi Penelitian Bisnis : Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Kaihatu, Thomas S. 2006. Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*. Vol 8 No.1.
- Li, H., & Qi, A. (2008). Impact Of Corporate Governance On Voluntary Disclosure In Chinese Listed Companies. *Corporate Ownership & Control* , Volume 5, Issue 2.
- Muh.Arief Effendi, The Power Of Good Corporate Governance, Salemba Empat, Jakarta 2009.
- Nasution, M., dan D. Setiawan. 2007. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba di Industri Perbankan Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi X Makassar*: 1- 26.
- Prawinandi, W., Suhardjanto, D., Dan H. Triatmoko. 2012. Peran Struktur Corporate Governance Dalam Tingkat Kepatuhan Mandatory Disclosure Konvergensi IFRS. *Simposium Nasional Akuntansi XV* .
- PT Bursa Efek Indonesia. 2004. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep- 305/BEJ/07-2004 Tentang Peraturan Nomor I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat. http://www.idx.co.id/Portals/0/StaticData/Regulation/ListingRegulation/id-ID/Peraturan_I-A_Gabung.Pdf
- Rachmawati, & Triatmoko. 2007. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laba dan Nilai Perusahaan. *Simposium Nasional Akuntansi X*
- Sari, R. N., Anugerah, R., & Dwiningsih, R. (2010)326-335). Pengaruh Struktur Kepemilikan, Kualitas Audit dan Ukuran Perusahaan terhadap Transparansi Informasi. *Pekbis Jurnal Vol.2, No.3* .
- Subiantoro, S. d. 2007. Pengaruh Struktur Kepemilikan Saham, Leverage, Faktor Intern dan Faktor kstern terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empirik Pada Perusahaan Manufaktur dan Non- Manufaktur di BEI. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Vol 9 No 1* , 41-48.
- Suhardjanto, D. dan L. Miranti. 2009. Praktik Penerapan Indonesian Environmental Reporting Index dan Kaitannya dengan Karakteristik Perusahaan. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia* 13 (1): 63-77.
- Suwardjono. 2005. Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan. Yogyakarta: BPFE.
- Ujiyantho, H. A., dan B. A. Pramuka. 2007. Mekanisme Corporate Governance, Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan. *Simposium Nasional Akuntansi X Makassar*: 1- 26.
- Utami, W. D., Suhardjanto, D., S. Hartoko. 2012. “Investigasi Dalam Konvergensi IFRS Di Indonesia: Tingkat kepatuhan pengungkapan dan Kaitannya dengan Mekanisme Corporate Governance .” *Simposium Nasional Akuntansi XV*.

- Wulandari, Ndaruningpuri. 2006. Pengaruh Indikator Mekanisme Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan Publik di Indonesia. Fokus Ekonomi Vol. 1 No. 2, Desember 2006
- Yularto, Pramudoyu Anton & Chariri, Anis. 2003. Analisis Perbandingan Luas Pengungkapan Sukarela dalam Laporan Tahunan Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta Sebelum Krisis dan Pada Periode Krisis, Jurnal Maksi , 2 (1), 19-32.
- Yulianingtyas, Rena Rukmita., Suhardjanto, Djoko. 2011. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Indonesia). Jurnal Akuntansi&Auditing. Volume 8/No.1/November 20011: 1-194.